

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada masa sekarang ini akuntansi merupakan suatu metode pencatatan keuangan yang telah banyak digunakan disemua bidang kegiatan pengelolaan keuangan, baik pada perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan.

Akuntansi juga digunakan pada instansi pemerintah yang lebih dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan sistem pencatatan akuntansi untuk pengelolaan keuangan pemerintah yang berlandaskan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Menurut Revrisond Baswir (2000:7), akuntansi pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga - lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba.

Akuntansi sektor publik di Indonesia akan terus berkembang. Perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi menimbulkan beragam tuntutan terhadap sistem pengelolaan pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan pemerintah harus dapat

dipertanggungjawabkan yang dapat diwujudkan dengan salah satunya yaitu pelaporan laporan realisasi anggaran.

Penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (*oversight body*) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran dalam sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/kesepakatan antara pimpinan dengan pimpinan lain yang dibawahnya untuk menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran

untuk hasil akhir dalam bentuk negoisasi merupakan pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana.

Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan Keuangan Pemerintah yang menggambarkan semua aktifitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan Pemerintah tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah tersebut. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai konsekuensinya pemerintah bertanggungjawab melaporkan pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat ini dalam suatu laporan pertanggungjawaban publik. Salah satu bentuk petanggung jawaban ini adalah anggaran dan laporan realisasi anggaran. Salah satu komponen pokok dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi ikhtisar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini sangat berguna untuk mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan kepatuhan entitas pelaporan terhadap ketentuan anggaran. Setiap laporan

realisasi anggaran harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP). Laporan Realisasi Anggaran dan Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan dalam PSAP No.2 tentang laporan realisasi anggaran. PSAP No.2 ini berisikan prinsip-prinsip mengenai Laporan Realisasi Anggaran. Adapun tujuan Standar Laporan Realisasi Anggaran menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan anggaran pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dan disini penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Realisasi Anggaran Berbasis Akrual Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Tahun 2014”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, sudah berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 khususnya PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis akrual?

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat ?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan PP No. 71 tahun 2010 khususnya PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis akrual pada penyusunan laporan realisasi anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat ?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penulisan ini tidak menyimpang dari fokus permasalahan, maka masalah yang akan dibahas penulis dibatasi pada Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012-2013. Peneliti tidak membahas semua masalah yang ditemukan, tetapi peneliti hanya membatasi pada penerapan basis akrual pada laporan realisasi anggaran dengan acuan PP No. 71 tahun 2010 khususnya PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran, yang pada tahun 2014 apakah pada laporan realisasi anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat tahun buku 2014 telah melakukan penyesuaian dengan PP No. 71 tahun 2010 khususnya PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran, dan pada penerapannya adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaporan laporan realisasi anggaran tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Peneliti ingin mengetahui apakah pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaporan laporan realisasi anggaran telah menerapkan basis akrual sesuai PP No. 71 tahun 2010 khususnya PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran dan faktor apa yang mempengaruhi anggaran yang belum terealisasi sesuai targetnya pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Peneliti ingin mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dalam menerapkan basis akrual sesuai PP No. 71 tahun 2010 khususnya PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis dapat digunakan sebagai:

- a. Salah satu acuan dalam menyusun laporan realisasi anggaran berbasis akrual sesuai PP No. 71 tahun 2010

- b. Salah satu kajian untuk penulisan ilmiah yang berkenaan dengan PP No. 71 tahun 2010 khususnya PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis akrual.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Badan Narkotika Nasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaporan laporan realisasi anggaran yang baik sesuai dengan standar yang ada yaitu PP No. 71 tahun 2010 khususnya PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis akrual, sehingga dapat digunakan untuk mengambil kebijakan akuntansi.